

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana;
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Arief, B.N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana;
- Asshiddiqie, J. (2010). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;
- \_\_\_\_\_. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Bawengan, G.W. (1991). *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita;
- Faal, M. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita;
- Hadjon, P.M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Harahap, M.Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga;
- Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- Kelana, M. (2007). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK Press;
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press;
- Kunarto. (2001). *Perilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal;
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Manan, B. (2004). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press;

- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group;
- Naning, R. (2009). *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Bandung: Mandar Maju;
- Rahardjo, S. (1980). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa;
- \_\_\_\_\_. (2000). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru;
- \_\_\_\_\_. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- \_\_\_\_\_. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Rahardi, P. (2014). *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalis Medan Reformasi*. Jakarta: Penerbit Laksbang Grafika;
- Ridwan, H.R. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada;
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo;
- Simbolon. (2003). *Ekonomi Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Jakarta: Remadja Karya;
- \_\_\_\_\_. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada;
- Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada;
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta;
- Susanto, F.A. (2004). *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta;

Tamin, O.Z. (2008). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: ITB Press;

Utrecht, E. (1988). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru;

Warpani, S.P. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB Press;

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor;

### **Sumber Lainnya :**

Andayani, D. (2022). *Diskresi Kepolisian dalam Pemberian Pengawasan Kendaraan Berdasarkan Pasal 134 Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Skripsi. Universitas Jember;

Buamona, M.S. dkk. (2017). Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota Di Kota Ternate. *Jurnal Spasial*. Universitas Sam Ratulangi diakses tanggal 25 Februari 2026 melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/spasial/article/view/17330>. hlm 82. DOI: <https://doi.org/10.35793/sp.v4i3.17330>;

Fauzi, A. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas oleh Kepolisian dalam Mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas*. Skripsi. Universitas Hasanuddin;

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false> pada tanggal 25 Februari 2026;

- Hidayat, A. (2018). Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan di Indonesia. *Jurnal Transportasi*. Volume 18. Nomor 2. hlm. 121 diakses melalui <https://journal.unpar.ac.id/index.php/jurnaltransportasi/> pada tanggal 30 Mei 2026;
- Kelman, H.C. (1958). Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change. *Journal of Conflict Resolution*. Volume 2. Nomor 1. hlm. 53 diakses melalui <https://www.jstor.org/journal/jconfreso> pada tanggal 30 Mei 2026;
- Marzuki, P.M. (2017). Penegakan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Yuridika*. Volume 32. Nomor 2;
- Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. hlm.105. <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=6>. diakses 25 Februari 2026;
- Prasetyo, T. (2019). Modernisasi Penegakan Hukum melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 8. Nomor 2. hlm. 221 diakses melalui <https://rechtsvinding.bphn.go.id/> pada tanggal 30 Mei 2026;
- Rizki. M. (2021). *Pelaksanaan Pengawalan Kendaraan Prioritas oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Bandar Lampung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Skripsi. Universitas Lampung;
- Wibowo, A. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 9. Nomor 3. hlm. 329 diakses melalui <https://rechtsvinding.bphn.go.id/> pada tanggal 30 Mei 2026;